

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**BPR SURYA PRIMA PERSADA  
TAHUN 2025**



**Ruko L'Agricola Blok A No.8 Gading Serpong - Curug  
Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang**

**TELEPON: 02129429610**



## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

### Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	<b>BPR SURYA PRIMA PERSADA</b>
Alamat	<b>Ruko L'Agricola Blok A No.8 Gading Serpong - Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang</b>
Nomor Telepon	<b>02129429610</b>

### Penjelasan Umum:

Dalam industri perbankan, penerapan Tata Kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Tata Kelola semakin diperlukan seiring meningkatnya risiko usaha serta kompleksitas tantangan industri perbankan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Surya Prima Persada sampai dengan posisi Desember 2025 belum memenuhi persyaratan minimum sebagaimana ketentuan regulator, dimana saat ini BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi. Kondisi tersebut terjadi karena Perseroan sedang dalam proses akuisisi oleh calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), sehingga penambahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan setelah proses akuisisi memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan efektif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha yang relatif sederhana, penguatan Tata Kelola dilaksanakan melalui pembentukan Pejabat Eksekutif tanpa pembentukan satuan kerja maupun komite di bawah Dewan Komisaris. Pada Desember 2025, BPR telah memiliki 4 (empat) Pejabat Eksekutif, yaitu PE Audit Internal, PE Kepatuhan/Manajemen Risiko/APU PPT, PE Operasional, dan PE Kredit.

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, PT BPR Surya Prima Persada menyusun Laporan Tata Kelola Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Tata Kelola selama tahun 2025 yang mencakup seluruh aspek kegiatan operasional dan fungsi organisasi BPR, sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>3. Cukup Baik</b>
--	----------------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal



ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola yang cukup signifikan seperti Saham PSP yang harus dialihkan segera dan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Diharapkan manajemen BPR mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	<b>HARTINI</b>
Jabatan	<b>Direktur</b>

### Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, OJK, dan/atau otoritas lain;
4. Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif dalam melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, apu ppt dan kepatuhan;
5. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS;
6. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan;
7. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
8. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang- undangan lain, termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang- undangan lain;
9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
10. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
11. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan;
12. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
13. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;
14. Memastikan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang perusahaan;
15. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil BPR secara keseluruhan;
16. Memastikan program APU&PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.

### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi sependapat bahwa penurunan rasio NPL menjadi prioritas utama. Direksi telah menyusun action plan penanganan NPL yang terukur dengan target penurunan NPL di bawah 5%, melalui langkah- langkah antara lain: penagihan intensif kepada debitur bermasalah, pelaksanaan restrukturisasi kredit secara selektif berdasarkan prospek usaha debitur, Percepatan proses eksekusi agunan sesuai ketentuan yang berlaku dan optimalisasi penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan akan mengoptimalkan peran bagian penagihan
2. Direksi memahami kondisi rasio LDR yang relatif tinggi seiring adanya pencairan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp27 miliar. Untuk itu Direksi akan: Mengimplementasikan strategi penghimpunan dana secara lebih agresif namun tetap prudent, Memperkuat hubungan dengan nasabah existing, melakukan pengelolaan likuiditas secara lebih ketat guna menjaga stabilitas operasional BPR.
3. Direksi akan melakukan komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), melaksanakan koordinasi berkala dengan calon investor dan pihak terkait, mendorong percepatan penyelesaian dokumen dan tahapan negosiasi agar proses pengalihan saham dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan regulator.
4. Direksi berkomitmen mempercepat penyelesaian proses pengalihan saham guna melengkapi struktur pengurus.
5. Direksi berkomitmen memastikan kebijakan dan prosedur pengendalian internal berjalan efektif
6. Terkait APU PPT, BPR sudah secara berkala memantau realisasi pengkinian data dan untuk pemblokiran secara serta merta dana terduga teroris dan pendanaan proliferasi, BPR sudah melaporkan nihil karena tidak ada nasabah BPR yang masuk ke daftar tersebut pada tahun 2025 dan BPR akan melakukan monitoring transaksi serta melakukan pelaporan sesuai ketentuan regulator.
7. Pada tahun 2025 Direksi sangat berhati- hati dalam penyaluran kredit dan lebih fokus menyelesaikan kredit bermasalah.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Jabatan	<b>Komisaris</b>

#### **Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari



satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

6. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
7. Dalam hal seluruh direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR;
8. Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan bank demi kemajuan usaha;
9. Menyetujui rencana kerja BPR yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
10. Menyusun Laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui. Laporan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
11. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
12. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR;
13. Mengawasi pelaksanaan program APU & PPT oleh Direksi BPR

#### **Rekomendasi Kepada Direksi:**

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi :

1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk segera menyusun action plan penangan NPI dengan target penurunan NPL menjadi dibawah 5%, penurunan NPL sebagai prioritas utama tahun 2026 dengan langkah yang terukur melalui penagihan intensif, restrukturisasi yang selektif, eksekusi agunan, serta percepatan penjualan AYDA.
2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk segera menyeimbangkan rasio LDR yang tinggi melalui strategi penghimpunan dana yang lebih agresif namun prudent, mengingat adanya pencairan DPK sebesar 27Milyar
3. Mengingat bahwa progres pengalihan saham PSP belum terealisasi sesuai yang telah ditetapkan dan keterlambatan ini dapat berdampak pada rencana strategis BPR dan berpotensi menimbulkan risiko operasional serta mempertimbangkan kondisi keuangan BPR. Direksi diminta untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur kepada PSP untuk mempercepat proses negosiasi dan penyelesaian pengalihan saham.
4. Pada fungsi kepatuhan, pelanggaran terjadi akibat kekosongan struktur pengurus, sehingga percepatan penyelesaian proses pengalihan saham sangat diperlukan agar struktur pengurus BPR lengkap dan terhindar dari penurunan compliance rating.
5. Direksi harus memastikan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan diterapkan secara efektif, termasuk pemisah fungsi, mekanisme otorisasi transaksi, pencatatan yang akurat, serta pengawasan berjenjang atas transaksi keuangan yang material
6. Direksi wajib memperkuat penerapan program APU PPT dengan melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT secara berkala serta memastikan pengkinian data nasabah berjalan dengan baik.
7. Pertumbuhan kredit harus berbasis kualitas aset, Direksi agar tidak hanya mengejar tarhet pertumbuhan kredit, namun memastikan setiap penyaluran kredit melalui analisa yang lebih prudent, pengawasan pasca pencairan yang ketat, serta pemilihan sektor ekonomi yang



memiliki risiko lebih rendah

#### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

##### Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Sampai dengan tahun 2025 BPR belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp50 Milyar

#### 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

##### Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Sampai dengan tahun 2025 BPR belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp50 Milyar

#### 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	<b>HARTINI</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

#### 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

##### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	<b>Henry Surya</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	<b>PT. BPR Andalan Daerah</b>



Persentase Kepemilikan (%)	<b>99,75</b>
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	<b>99,75</b>

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	<b>HARTINI</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

## 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	<b>HARTINI</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>



Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

**Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR**

1.	Nama	<b>Henry Surya</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
2.	Nama	<b>Thomas Widjaya Lesmana</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

Direksi BPR tidak memiliki Hubungan Keuangan baik dengan Anggota Komisaris maupun Pemegang Saham

Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan Direksi maupun Pemegang Saham  
Seluruh Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham lainnya

**10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR****Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

1.	Nama	<b>HARTINI</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan	<b>Tidak ada</b>



Pemegang Saham Lain di BPR

### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	<b>Henry Surya</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
2.	Nama	<b>Thomas Widjaya Lesmana</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

Direksi BPR tidak memiliki Hubungan Kekeluargaan baik dengan Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Pemegang Saham  
Seluruh Pemegang Saham BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham lainnya



## 11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	<b>Rp276.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	<b>Rp120.000.000</b>

### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp73.406.900</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp15.795.918</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp23.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp10.000.000</b>

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan	<b>Rp0</b>



Kompensasi berbasis saham Direksi  
(Rp)

Jumlah Komisaris Penerima  
Kompensasi berbasis saham **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan  
Kompensasi berbasis saham Komisaris  
(Rp) **Rp0**

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi  
lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan  
Remunerasi lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima  
Remunerasi lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan  
Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) **Rp0**

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan  
(Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Direksi  
(Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima  
Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris  
(Rp) **Rp0**

#### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi  
(Orang) **1 orang**

Jumlah Nominal Transportasi Direksi  
(Rp) **Rp0**



Jumlah Komisaris Penerima  
Transportasi (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Transportasi  
Komisaris (Rp) **Rp0**

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi  
Kesehatan (Orang) **1 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan  
Direksi (Rp) **Rp27.948.100**

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi  
Kesehatan (Orang) **1 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan  
Komisaris (Rp) **Rp27.948.100**

### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-  
Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya  
Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas  
Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya  
Komisaris (Rp) **Rp0**

pada tahun 2025 jumlah pengurus BPR 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **3,00 : 1**

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **1,00 : 1**



**3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah**

Rasio (a/b) **1,00 : 1**

**4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi**

Rasio (a/b) **2,30 : 1**

**5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi**

Rasio (a/b) **1,50 : 1**

Gaji yang diperbandingkan diatas adalah imbalan yang diterima oleh komisaris, Direktur dan pegawai perbulan, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR Selama Tahun 2025 jumlah pengurus BPR 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Direktur

**13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

**1.** Tanggal Rapat **20 Januari 2025**

Jumlah Peserta **1 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Realisasi RBB Semester II tahun 2024
2. APU PPT
3. Isu Lainnya

**2.** Tanggal Rapat **28 Februari 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Audit Internal
2. Kantor Akuntan Publik
3. Evaluasi Kebijakan
4. Manajemen Risiko
5. Fungsi Kepatuhan
6. Laporan Pelaksanaan GCG
7. Isu Strategis Lainnya

**3.** Tanggal Rapat **14 April 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**



1. Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2025
2. Isu Lainnya

4. Tanggal Rapat **17 April 2025**

Jumlah Peserta **1 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Penyelesaian Kredit Bermasalah

5. Tanggal Rapat **26 Mei 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Pembahasan Temuan Audit Internal-Kasus Fraud Deposito
2. Isu Lainnya

6. Tanggal Rapat **19 November 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025
2. Pengawasan penerapan integritas pelaporan keuangan Bank
3. Isu Lainnya

7. Tanggal Rapat **28 November 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Pengawasan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
2. Pengawasan penerapan Strategis Anti Fraud
3. Isu Lainnya

8. Tanggal Rapat **10 Desember 2025**

Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. RBB tahun 2026
2. Isu Lainnya

Dalam hal tertentu, rapat Dewan Komisaris juga dihadiri oleh Direksi  
Pada tahun 2025 BPR hanya memiliki 1 Komisaris



#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>LENA ERDAWATI</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>8 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Pada Tahun 2025 Dewan Komisaris BPR hanya 1 Orang, yaitu Komisaris  
Total rapat sebanyak 8 (delapan) kali

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

##### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun **0 kasus**



#### Laporan

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

#### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Pada tahun 2025 tidak ada Penyimpangan Internal (Internal Fraud) pada BPR Surya Prima Persada

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>

Selama Tahun 2025, tidak terdapat Permasalahan Hukum di BPR



### 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam Tahun 2025, tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

### 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	09 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sumbangan untuk bencana banjir di Sumatra Utara dan Aceh
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk bencana banjir di Sumatra Utara dan Aceh disalurkan melalui perbarindo
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

Pada tahun 2025, BPR memberikan sumbangan untuk bencana banjir di Sumatra Utara dan Aceh yang disalurkan melalui perbarindo

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR SURYA PRIMA PERSADA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 20 April 2026

**BPR SURYA PRIMA PERSADA**

Disiapkan Oleh

**Hartini**  
Direktur



Disetujui Oleh

**Lena Erdawati**  
Komisaris